Bimtek PPID, Plt. Bupati Dorong Desa Lebih Transparan

KUDUS - Keterbukaan informasi menjadi sebuah kebutuhan pada zaman globalisasi seperti sekarang. Dalam penyelenggaraan pemerintah, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan masyarakat. Plt. bupati Kudus H.M. Hartopo mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat desa untuk menginformasikan potensi desa kepada masyarakat saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai IV Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (1/8).

Menurut H.M. Hartopo, adanya demokratisasi dan transparansi membuat masyarakat ikut aktif mengawal program pemerintah. Selain itu, informasi dan kegiatan yang disampaikan lewat website dan media sosial secara tidak langsung mengajak masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan dari masyarakat akan mendorong pemerintahan lebih bersih dan mengurangi hal negatif . "Upaya publikasi informasi ke masyarakat akan membantu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujarnya.

Tak sekedar transparansi, PPID diminta untuk memilah informasi yang harus dipublikasikan. Harus ada kebijaksanaan dari pemerintah desa dalam menyajikan data. Jangan sampai informasi yang bersifat rahasia dipublikasikan. Oleh karena itu, Plt bupati meminta peserta untuk mengikuti jalannya Bimtek dan bertanya kepada narasumber apabila ada hal yang belum jelas. "Jangan sekedar menginformasikan, harus dipilah mana yang harus dipublikasikan. Kalau ada yang belum jelas, langsung ditanyakan kepada narasumber," ucapnya.

Dalam publikasi informasi, H.M. Hartopo mengimbau agar setiap desa menunjuk petugas khusus untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan. Menurutnya, tugas sekretaris desa telah banyak sehingga tugas publikasi dan dokumentasi sudah seharusnya dilimpahkan oleh petugas lain. Pemerintah desa dapat membentuk kepala urusan baru atau petugas yang masih melekat di bawah sekretaris desa. "Tugas sekretaris desa telah banyak. Kalau bisa ada petugas lain yanh bisa mendata kegiatan dan informasi yang harus dipublikasikan," ungkapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kudus Kholid Seif menjelaskan, ada 123 peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis. Kholid berharap pemerintah desa dapat mengaktifkan website dan media sosial untuk mempublikasikan potensi desa. Pemerintah desa dapat mengajak karang taruna setempat untuk bekerja sama dengan Karang Taruna dan media desa. Apalagi, keterbukaan informasi masuk dalam penilaian Komisi Informasi untuk menentukan kabupaten/kota tersebut sudah informatif atau belum. "Tahun kemarin, Kudus mendapatkan predikat menuju informatif. Semoga tahun ini Kudus mendapat predikat informatif," harapnya.